



**MEKANISME PENGENAAN PAJAK RESTORAN
OLEH DINES PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh
Anita Indriasari
NIM 030903101050

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

PERSEMBAHAN

Laporan ini saya persembahkan untuk:

1. Papa dan Mamaku tersayang, Drs. Sri Multantyo, dan Sri Sulastris atas segala pengorbanan yang telah dilakukan, serta doa dan kasih sayang yang diberikan sehingga aku dapat menyelesaikan studi ini;
2. Almamaerku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

Kalau Borobudur merupakan salah satu warisan nenek moyang,
maka salah satu warisan yang mulia bagi anak cucu kita
adalah Pajak ^{*)}

^{*)} Berita Pajak 1347, 1997. Majalah Berita Pajak

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Anita Indriasari

NIM : 030903101050

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis yang berjudul: *Mekanisme Pengenaan Pajak Restoran Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansinya disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Juni 2007

Yang menyatakan,

Anita Indriasari

NIM 030903101050

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

**MEKANISME PENGENAAN PAJAK RESTORAN
OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

Oleh

Anita Indriasari

NIM 030903101050

Pembimbing : Selfi Budi Helfiastuti, M.sos, M.Si.

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul *Mekanisme Pengenaan Pajak Restoran Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kabupaten Jember pada:

Hari : Senin

Tanggal : 29 Okteber 2007

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Penguji I,

Penguji II,

Drs. H. M. Affandi, MA
NIP 130 531 978

Selfi Budi Hefiastuti, M.Sos, M.Si
NIP 132 133 403

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Drs. H. Uung Nasdia B.S.W, M.S
NIP 130 674 836

RINGKASAN

Mekanisme Pengenaan Pajak Restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Anita Indriasari, 030903101050, 2007, 50 hal.

Pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat dominan, salah satunya adalah Pajak Restoran. Tujuan penulis adalah untuk mengetahui mekanisme pengenaan pajak restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Laporan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, pada tanggal 1 sampai 31 Desember 2006 dan objek yang diambil adalah Pajak Restoran. Menghitung besarnya Pajak Restoran yang terhutang adalah dengan menggunakan besarnya jumlah rata-rata penghasilan atau pendapatan sebuah restoran atau rumah makan setiap bulannya dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintahan.

Hasil yang diperoleh dari laporan ini adalah bahwa mekanisme pengenaan pajak restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pemungutannya menggunakan *Official Assysment System* yang seharusnya menggunakan *Self Assysment System*¹⁾, sehingga memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak restoran. Mengingat pajak restoran ikut berperan dalam mengembangkan Otonomi Daerah.

Kesimpulan yang didapat dari laporan ini bahwa mekanisme pengenaan pajak restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

¹⁾ dalam buku Pajak dan Retribusi Daerah, Marihot P.S.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “Mekanisme Pengenaan Pajak Restoran Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”, guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan Program Studi Diploma III Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Semangat dan dukungan moril dari berbagai pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih pada mereka yang selama ini memberi dorongan, bimbingan serta perhatian baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Ung Nasdia B.Sw, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Ibu Dra. Hj. Dwi Windra Dini Bp, Msi, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan;
3. Bapak Edy Wahyudi, M.Sos, selaku Dosen Wali yang telah banyak membimbing dan mengarahkan dalam kegiatan di kampus;
4. Ibu Selfi Budi Helfiastuti, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Laporan yang telah membantu memberi saran dan petunjuk yang berguna untuk penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini;
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Bapak Drs. Suprpto, MM, selaku pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah memberi ijin untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata beserta para staf yang telah membantu memberikan data-data yang penulis butuhkan;

7. Kakak-kakakku, mbak Lisa dan mas Hari, mas Johan dan mbak Ani, mbak Pipit serta para keponakanku yang lucu, Zhao Wei dan Rafi yang selalu memberikan dukungan dan dorongan;
8. Mas Pram yang selalu memberi semangat dalam sebagian hidupku;
9. Sahabat-sahabatku, cece Fraya dan Linda, terima kasih untuk selalu menjadi teman terbaikku;
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan laporan ini.

Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Jember, Juni 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	4
1.3.1. Tujuan Praktek Kerja Nyata	4
1.3.2. Manfaat Praktek Kerja Nyata	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Pengertian Pajak	5
2.2. Dasar Hukum Pajak	7
2.3. Fungsi Pajak, Teori dan Sistem yang mendukung pemungutan pajak	7
2.4. Wajib, Subjek dan Objek Pajak	8
2.5. Pengertian Pajak Daerah	9
2.5.1. Wajib, Subjek dan Objek Pajak Daerah	9
2.5.2. Dasar Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	9
2.5.3. Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah	9
2.5.4. Tarif Pajak Daerah	10

2.6. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak yang Kadaluwarsa	11
2.7. Pajak Restoran	11
BAB 3. GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH	
KABUPATEN JEMBER	13
3.1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ...	13
3.2. Kedudukan dan Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	14
3.3. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	14
3.4. Kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	15
3.5. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	15
3.6. Potensi Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	29
BAB 4. PELAKSAAN PRAKTEK KERJA NYATA	31
4.1. Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	31
4.2. Hasil Praktek Kerja Nyata	35
4.2.1. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak	37
4.2.2. Mekanisme Pengenaan Pajak Restoran	42
4.3. Keberatan dan Banding	46
4.4. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	46
4.5. Sanksi Pidana	47
4.6. Penilaian terhadap Kegiatan Lembaga dalam Pelaksanaan Perpajakan	47
BAB 5. PENUTUP	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

1. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ... 17
2. Bagan Tata Cara Pembayaran Pajak Restoran pada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 45

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Realisasi Penerimaan, Anggaran dan Prosentase Pendapatan Asli Daerah tahun 2005-2006	3
2. Realisasi Penerimaan dan Anggaran Pendapatan Asli Daerah dari Daerah tahun 2005-2006	29
3. Uraian Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	33
4. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak yang terhutang	40
5. Perhitungan Target dan Realisasi Pajak Restoran dari tahun 2003-2006	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

1. Surat ijin pelaksanaan kegiatan magang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Surat tugas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Surat ijin Praktek Kerja Nyata dari Badan Kesatuan Bangsa dan LIMAS (BAKESBANG);
4. Surat persetujuan melaksanakan kegiatan magang pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
5. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
6. Nilai hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
7. Surat tugas dosen pembimbing;
8. Daftar kegiatan bimbingan Laporan akhir;
9. Formulir pendataan objek pajak restoran
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
11. Surat Tanda Setoran.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus menuju kemajuan dan perbaikan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dimana dalam pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga menuntut partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dalam mencapai suatu perubahan dan keadaan yang lebih baik. Pelaksanaan pembangunan di Indonesia disebut pembangunan nasional yang bertujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Memperhatikan luas dan kompleksnya urusan yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah, propinsi dan kabupaten.

Pemerintah Daerah perlu menentukan bentuk yang seimbang antara fungsi pelayanan dan fungsi sebagai penyedia tata aturan yang menjamin bergeraknya dinamika sosial-ekonomi rakyat. Bentuk ini untuk menopang pelaksanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerataan serta mendorong percepaan pertumbuhan ekonomi.

Otonomi daerah menjadi tugas pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dimana daerah tersebut harus mampu mencukupi anggaran daerahnya. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dan dinamis, serasi dan bertanggung jawab diperlukan pendapatan untuk membiayai pembiayaan anggaran rutin maupun pembiayaan pembangunan. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta usaha peningkatan perumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penggalan sumber-sumber asli daerah, khususnya dari sektor pajak daerah. Disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat berupa subsidi yang menjadi sumber anggaran, pemerintah daerah juga mendapat anggaran dari pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan penyumbang dana

yang cukup besar dalam peningkatan perekonomian daerah. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah ditetapkan proses pelaksanaannya dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan serangkaian proses mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga dapat mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Untuk mengembangkan potensi daerah secara maksimal Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan beberapa hal, diantaranya dari Pajak Daerah dan retribusi daerah. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan ekonomi da daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan Asli Daerah. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dengan dilakukan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, penambahan jenis pajak dan pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan, khususnya dari sektor pajak daerah.

Dengan melihat kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember, khususnya dari sektor Pajak Daerah yang hasil pendapatannya melebihi target yang dianggarkan, merupakan suatu bukti nyata bahwa pendapatan dari pajak mempunyai peranan besar dalam menyukseskan Otonomi Daerah, diantaranya melalui Pajak Restoran. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan pertambahan persentase pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun 2006 yaitu, untuk pajak hotel kenaikannya 14,71% dari target yang dianggarkan dan untuk Pajak Restoran sebesar 84,83% dari target yang dianggarkan, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan, Anggaran dan Prosentase Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah Tahun 2005 s/d 2006

No.	Jenis Pajak Daerah	Tahun 2005			Tahun 2006		
		Anggaran	Realisasi	Kelebihan %	Anggaran	Realisasi	Kelebihan %
1.	Pajak Hotel	205.000.000	242.956.445	18,52	230.000.000	263.839.235	14,71
2.	Pajak Restoran	210.000.000	479.182.330	128,18	350.000.000	646.890.208	84,83
3.	Pajak Hiburan	65.000.000	131.798.425	102,77	97.500.000	162.393.200	66,59
4.	Pajak Reklame	550.000.000	827.297.500	50,42	750.000.000	1.072.144.000	42,95
5.	Pajak Penerangan jalan	13.000.000.000	14.544.432.063	11,88	14.382.000.000	16.837.550.011	17,87
6.	Pajak Bahan Gal. Gol C	75.000.000	85.369.396	13,83	75.000.000	196.116.175	61,49
	J u m l a h	14.105.000.000	16.311.036.159	15,64	15.884.500.000	19.178.932.829	20,49

Sumber: berdasarkan laporan Realisasi dan Anggaran PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2006.

Berdasarkan uraian di atas, penulis membuat Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul **“Mekanisme Pengenaan Pajak Restoran Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Peranan pajak daerah khususnya Pajak Restoran sangatlah penting bagi daerah, karena bisa menunjang Pendapatan Asli Daerah. Mengacu dari dasar itu dan tidak lepas dari judul laporan yang penulis angkat, maka penulisan laporan dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimanakah mekanisme pengenaan pajak daerah khususnya pajak restoran oleh Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Penulis ingin mengetahui bagaimanakah Mekanisme Pengenaan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. untuk menambah wawasan, melatih pola pikir dalam menanalysis suatu permasalahan dan untuk memperoleh serta meningkatkan ketrampilan dan kreativitas diri;
- b. untuk mendapatkan pengalaman kerja di bidang Perpajakan setelah keluar dari bangku kuliah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Setiap orang baik orang pribadi maupun badan yang tinggal atau bertempat tinggal atau berada pada suatu negara pasti akan berhadapan dengan masalah pajak, ibarat tiada suatu negara tanpa pajak. Memang pajak adalah suatu masalah negara atau nasional.

Ada beberapa pengertian tentang pajak yang diberikan oleh para ilmuwan, antara lain:

a. pengertian Pajak menurut Sommerfeld

Sommerfeld adalah seorang ilmuwan Amerika, mendefinisikan pajak sebagai suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta ke sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapatkan suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang agar pemerintah dapat menjalankan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

b. pengertian Pajak menurut Prof.Dr. Rachmat Soemitro

Dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pajak, pajak sebagai suatu iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa timbal balik yang langsung ditunjuk dan yang dihunakan untuk membiayai keperluan umum (*publik vigiven*).

c. pengertian Pajak menurut Soeparman Soemohamodjojo

Soeparman mendefinisikan pajak sebagai suatu iuran wajib. Berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.